

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan pembunuhan akan tetapi dalam KUHP tampaknya tidak mampu mencegah perbuatan pidana mati dalam masyarakat ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan.¹ Tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP, sebagai berikut :

Pasal 338 berbunyi :

Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 berbunyi :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pemedanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun

Istilah Pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.² Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

¹ M. Amin Suma, dkk, (2001). *Pidana Islam di Indonesia*., Cetakan ke-1, Pustaka Firdaus, hlm 87.

² Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyr'i Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanulil Wad'iy)*, Penerbit Kharisma Ilmu, Bogor. Jld. III, hlm 177.

Sedangkan mengenai beberapa orang bersepakat melakukan kejahatan (*penyertaan*) dapat dilihat dalam KUHP Pasal 55 – 56. Berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:*
 1. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.*
 2. *Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.*³
- (2) *Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.*
- (3) *Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:*
 1. *Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.*
 2. *Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.*

Pasal tersebut orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan serta mereka yang membantu dalam melakukan tindak pidana dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana *penyertaan*. Arti kata *penyertaan (delneming)* adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana,⁴ Diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan nama *jarimah* yang menurut Abd Qadir Audah ditafsirkan dengan larangan-larangan *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Oleh karena itu pembunuhan termasuk dalam *jarimah* menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *Qishash*.

Pembunuhan disertai *penyertaan* merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan *penyertaan* dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP. *Penyertaan* pembunuhan dapat diartikan turut sertanya seorang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan terhadap jiwa atau nyawa manusia yang dilakukan dengan tujuan dan waktu yang sama. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan pelakunya tidak

³Moeljatno, (2006), *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cetakan ke-25, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 25.

⁴Wirjono Prodjodikoro, (2008) *Tindak Pidana Di Indonesia*, Cet. 7, Bandung: Refika Aditama, hlm 108.

hanya seorang saja melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda peranan dan andilnya, sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing pelaku.

Seperti dapat kita lihat pada kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita yang dilakukan dengan menembak korban oleh dua orang, Noval dan Mulawarman yang dihukum dengan hukuman seumur hidup. Kedua eksekutor tersebut melakukan pembunuhan tersebut atas bujukan Tommy Soeharto yang kemudian dihukum atas dakwaan membujuk melakukan pembunuhan dan aktor intelektual pada kasus itu yang dihukum dengan hukuman lima belas tahun penjara.⁵

Jelas yang dimaksudkan dengan *barang siapa* (pasal 338), adalah orang dan orang ini adalah satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Apabila semata-mata berdasarkan rumusan pasal 338 KUHP tadi, pada kasus Ahmad membunuh Yaman dengan tikaman, dimana Badru memegang tangannya agar tidak melawan, dalam kasus ini Badru tidak dapat menerima pertanggungjawaban pidana. Mengapa Badru tidak dipidana? Karena apa yang dilakukan Badru dalam pembunuhan tadi tidak memenuhi rumusan pembunuhan (pasal 338 KUHP), dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur perbuatan dalam kejahatan itu. Dari perbuatan Badru memegang tangan tidaklah menimbulkan kematian Yaman, walaupun perbuatan Badru mempunyai andil atau peran terhadap kelancaran Ahmad melakukan kejahatan.⁶

Peristiwa di atas, tampak dengan jelas bahwa dari rumusan pasal 338 KUHP, tentulah bahwa Badru karena perbuatannya memegang tangan, pasti tidak dipidana, karena tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan. Agar Badru juga dapat dipidana, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatannya seperti itu. Dengan maksud yang demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuat dalam

⁵Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, (2003). *Qishas, Pembalasan Yang Hak*, Jakarta: Kahirul Bayan, hlm 3.

⁶Adami Chazawi, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III (Percobaan dan Penyertaan)*, Cetakan ke-4, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm 70.

pasal 55-56 KUHP. Dengan ketentuan perihal penyertaan ini, Badru dibebani pertanggungjawaban pidana dan karenanya dipidana pula.

Keterlibatan beberapa orang dalam kasus penyertaan pembunuhan ini, mengakibatkan pada konsekuensi hukuman atau pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh para pelaku diantaranya, pelaku turut serta (*medapleger*), penyuruh melakukan (*doenpleger*), penganjur melakukan (*uitlokker*), dan pembantu melakukan (*medeplichtige*). Dalam kejahatan penyertaan pembunuhan.

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum yang termuat dalam KUHP tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam, perbedaan yang mencolok baru terlihat dalam penggolongan atas *hudud*, *qishash* dan *ta'zir* yang terdapat dalam hukum Islam.⁷ Keikutsertaan dalam melakukan perbuatan kejahatan itu, harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: para pelaku terdiri atas beberapa orang dan para pelaku dihubungkan pada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya.⁸

Konsep hukum pidana Islam, mengenai penyertaan dibedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung maka para fuqaha membagi menjadi dua yaitu: orang yang berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* (*syarik mubasyir*) dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*. Orang yang tidak berbuat langsung dalam melaksanakan *jarimah* (*syarik mutasabbib*) perbuatannya disebut *al-istirak ghairul mubasyir* atau *al-istirak bi at-tasabubi*.⁹

Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Yaitu dengan tindak pidana mati, atau hukuman *qishash*. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah

⁷Topo Santoso, (2000), *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung : Asy Syaamil, hlm 147.

⁸Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyr'i Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanulil Wad'iy)*, Penerbit Kharisma Ilmu, Bogor. Jld. II. hlm 36.

⁹Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op. Cit*, Jilid II. hlm 35.

tetap dilaksanakan hukuman *qishash*, atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh, tapi adanya hukuman *qishash* ini ternyata efektif untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.¹⁰

Seseorang yang mencoba mengambil hak orang lain, menyangkut jiwa maka orang yang melakukannya dapat dihukum dengan hukuman yang sepantasnya untuk menghindari atau mencegah kejahatan itu. Akan tetapi adakalanya penyertaan itu melampaui batas atau berakibat fatal yang hal itu di luar perhitungannya semula, seperti mengakibatkan luka parah, atau bahkan mengakibatkan terbunuhnya seseorang.

Kasus bersekutu dalam pembunuhan, tergantung keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Jika seseorang terlibat dalam pemukulan terhadap pihak terbunuh, maka ia tergolong sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan secara pasti. Adapun, jika seseorang terlibat dalam pemukulan, maka hal ini perlu dicermati lagi. Jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan terjadinya pembunuhan, seperti mencegah pihak yang kehendak dibunuh lalu orang tersebut dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan pihak terbunuh kepada pelaku pembunuhan, ataupun yang lainnya, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai pihak yang turut membantu pembunuhan. Orang semacam ini tidak dibunuh, akan tetapi dipenjarakan saja.

Menurut aturan Syari'at Islam, hukuman yang telah ditentukan dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung (*syarik mubasyir*), bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung (*syarik mutasabbib*). Sebab *pertama*, para fuqaha hanya memusatkan perhatian mereka untuk menerangkan hukum-hukum yang bentuk ukuran hukumannya telah ditentukan oleh *syara* yaitu *hudud* dan *qishash* termasuk didalamnya pembunuhan, dan sebab yang *kedua*, kaidah (prinsip) umum dalam hukum Islam menetapkan bahwa hukuman yang telah ditentukan

¹⁰M. Amin Suma, dkk, *Op.Cit*, hlm 88.

hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara langsung, bukan pada pelaku tidak langsung.¹¹

Para fuqaha selainnya mengecualikan salah satu jarimah pembunuhan dengan aturan umum tersebut. Untuk jarimah pembunuhan, baik pembuat langsung ataupun pembuat tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya ialah karena jarimah pembunuhan bisa dikerjakan dengan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat jarimah itu. Kalau kita berpegang seluruhnya dengan aturan tersebut maka akibatnya banyak pelaku tidak langsung yang terhindar dari hukuman atau pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukan, sedangkan ia sebenarnya turut serta dalam melaksanakan jarimah tersebut seperti pelaku langsung juga.¹²

Persoalan pertanggungjawaban dalam jarimah penyertaan pembunuhan memang menarik kita bahas, terlihat ada perbedaan pendapat tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan penyertaan terhadap perbuatan yang dilakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitupun pertanggungjawaban dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dari hal itulah penulis tertarik untuk menganalisis kasus tindak pidana penyertaan pembunuhan tersebut, dengan pertanggungjawaban pidana yang ditanggung oleh para pelakunya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam?

¹¹Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Jilid II, hlm 35.

¹²Ahmad Hanafi, (1990), *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, hlm 138.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56 dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran bagi para pemerhati bidang kajian ilmu hukum pidana Islam, khususnya bagi para mahasiswa dan dosen.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya nilai syari'at Islam di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Seorang ahli hukum Belanda

Simons memberikan definisi, suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.¹³

Dalam hukum Islam ada dua Istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jarimah* dan *Jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang *Syara*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha yang membatasi *jinayah* untuk *jarimah hudud* dan *jarimah qishash* saja.¹⁴

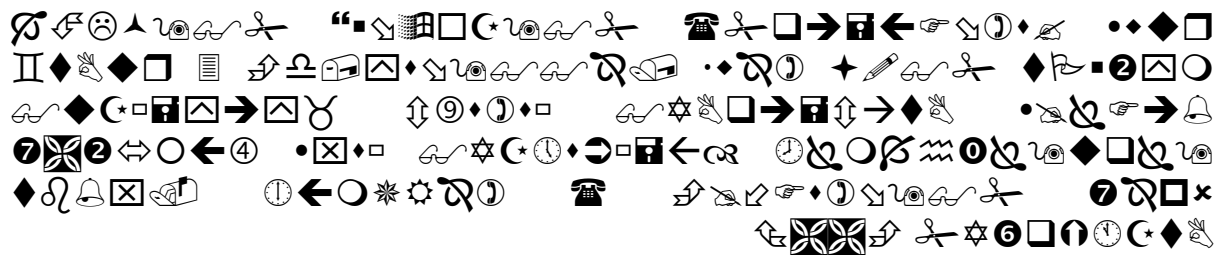
Salah satu jarimah dalam hukum pidana Islam salah adalah jarimah pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat keji dan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana *qishas* atau termasuk *jarimah qishas* yang ancaman hukumnya adalah dibunuh. Menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

Seperti dalam hukum agama lain, pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun demikian, agama Islam membaginya menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan yang haram dilakukan dan pembunuhan yang halal dan harus dilakukan. Pembunuhan yang haram dilakukan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disertai alasan yang dibenarkan oleh syara, sedangkan pembunuhan yang halal dilakukan adalah pembunuhan bagi pelaku suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh syara, baik dia membunuh maupun

¹³Topo Santoso, *Op.cit*, hlm 132.

¹⁴Ahmad Hanafi, (1990), *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, hlm 1.

melakukan tindakan lain yang mengharuskan pelakunya diberi hukuman bunuh. Pembagian tersebut berdasarkan pemahaman surat Al-Isra ayat 33 :



Artinya: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang dibenarkan dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas-dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Al-Isra ayat 33)

Ayat tersebut dapat kita pahami bahwa jiwa (nyawa) terbagi dua. *Pertama*, jiwa yang dilindungi, karena itu diharamkan untuk dihilangkan (dibunuh), tanpa alasan yang sah. *Kedua*, jiwa (nyawa) yang boleh dihilangkan, karena mempunyai alasan yang kuat untuk menghilangkannya, misalnya kepada orang yang melakukan perzinaan sedangkan dia telah melakukan perkawinan (*muhsan*), orang yang melakukan pembunuhan, meninggalkan agamanya (*murtad*) melakukan *jarimah hirabah* (perampokan).

Para fuqaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai cara pandang masing-masing. *Pertama*, pembunuhan dibagi dua, sebagian fuqaha membagi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak sengaja (tersalah). Pembunuhan disengaja menurut mereka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan mendatangkan kematian, baik pelaku sengaja ingin membunuhnya maupun tidak, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terjadi karena main-main atau atau dimaksudkan untuk memberi pendidikan kepada orang yang berhak dididik. Adapun pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ini adalah pembagian yang terkenal diantara mazhab Maliki.¹⁵

¹⁵Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Jilid III, hlm 178.

Kedua, pembunuhan dibagi menjadi tiga, mayoritas fuqaha membaginya menjadi tiga diantaranya: Pembunuhan sengaja (*qatlul 'amd*) Pembunuhan semi sengaja (*qatlul syibhul 'amd*), dan Pembunuhan tidak sengaja

Ketiga, pembunuhan dibagi menjadi empat diantaranya : pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan yang dianggap tersalah.

Keempat, pembunuhan dibagi menjadi lima diantaranya : pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan yang dianggap tersalah, dan pembunuhan tidak langsung.¹⁶

Pembagian pembunuhan menjadi tiga merupakan pembagian paling populer dan banyak digunakan. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membaginya menjadi tiga bentuk, yang kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaannya setidaknya tidak diakui oleh kelompok Malikiyyah penggolongan jarimah pembunuhan menjadi tiga macam kategori, lebih masyhur daripada penggolongan yang pertama tadi. Penggolongan tersebut adalah:

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan disengaja atau *qathlul amdi* menurut Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah Bakri memasukkan alat pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semisengaja.

Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya, di samping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa

¹⁶*Ibid*, hlm 179

paling besar atau *akbarul kaba'ir*. Hukuman jarimah ini apabila memenuhi persyaratan dan memenuhi semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja ada tiga, yaitu berikut ini.

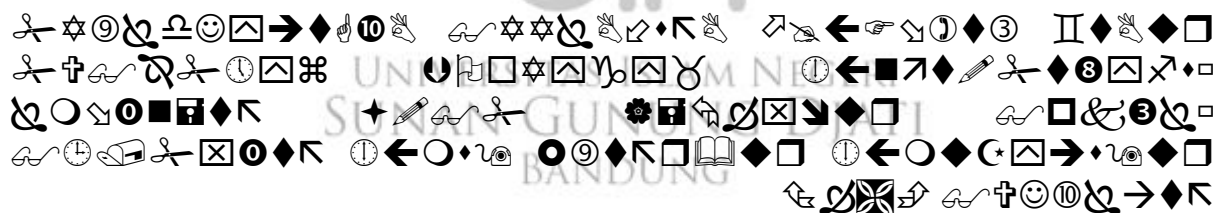
Pertama, si terbunuh adalah manusia hidup. Maksudnya, ketika pembunuhan itu dilakukan, si korban dalam keadaan hidup kendati dalam kondisi kritis. Ini sesuai dengan definisi bahwa pembunuhan adalah upaya menghilangkan nyawa orang yang masih hidup. Oleh karena itu, kalau seandainya seseorang menembak atau menusuk orang yang sudah mati tidak disebut membunuh sebab nyawa orang tersebut memang telah hilang. Kerelaan orang yang dibunuh, misalnya karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang menyebabkan keputusan (*mercy killing* atau *euthanasia*), tidak mengurangi hukuman bagi si pelaku. Hal ini karena kerelaan untuk dibunuh bukan termasuk kebolehan untuk melakukan pembunuhan, bukan termasuk kategori yang dibenarkan syara dan ketidakrelaan itu sendiri bukan merupakan salah satu unsur jarimah pembunuhan. Oleh karena itu, ada ulama yang menetapkan sanksi perbuatan ini adalah *qishash* sebab pemaafan dalam *qishash* hanya ada setelah terjadi pembunuhan. Selain itu pemberian izin sebelum pembunuhan bukan merupakan syubhat yang mempengaruhi hukuman *qishash*, Ulama lain dalam mazhab Syafi'i, menyamakan kerelaan dibunuh dengan pemaafan setelah terjadi pembunuhan. Jadi, sanksinya bukan *qishash* atau diyat. Kerelaan dianggap sebagai syubhat dalam pembunuhan seperti ini.

Kedua, kematian korban merupakan hasil dari perbuatannya. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dia pakai ketika melakukan pembunuhan tersebut. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang dipakai tersebut haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau alat yang dipakai keluar dari kelazimannya (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengundang syubhat, sedangkan syubhat harus dihindari.

Ketiga, adanya niat. Keinginan atau kesengajaan si pelaku yang merupakan itikad jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. Kematian tersebut adalah bagian dari skenario perbuatannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki, sebagai tujuan akhirnya. Kalau kematian si korban itu tidak diniati atau bukan tujuannya, kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja. Niat jahat si pelaku memang sulit dibuktikan sebab niat merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan juga alat yang dipakainya untuk membunuh. Mengenai alat yang digunakan, dalam pembunuhan sengaja pasti digunakan alat yang dengan cepat dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan dengan sengaja tidak akan menggunakan alat yang tidak lazim digunakan dalam pembunuhan walaupun alat tersebut bisa saja menghasilkan kematian dalam waktu yang lama.

Adapun dasar larangan dan sanksi hukum terhadap pembunuhan sengaja, dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai berikut:

Surat an-Nisa ayat 93



Artinya: *"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekalah dia di dalamnya. Allah memurkainya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya."* (An-Nisa ayat 93)¹⁷

Surat di atas dengan jelas telah melarang tindak pidana pembunuhan disengaja, dan hukumannya pun atau pertanggungjawaban pidananya dibalas dengan setimpal (*qhisash*).

Adapun dalam hadits :

مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا يَقْتُلُ فَهُوَ قَوَادُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

¹⁷Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Jilid III, hlm 181.

Artinya: "Barang siapa membunuh orang mukmin, maka baginya qawad/qishash, (dibunuh kembali), kecuali kalau diridai wali si terbunuh."

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِنْ أَحْبَبُوا الْقَوَادَ أَوْ الْقِصَاصَ إِنْ أَحْبَبُوا فَالْعَقْلُ أَيْ الدِّيَّةُ.

Artinya: "Apabila seseorang dibunuh, maka ahli warisnya mempunyai dua pilihan, apabila dig mau, maka dia dapat mengambil qishash (dibunuh kembali) dan apabila dia mau dapat mengambil diyat (penyerahan sejumlah harta)."¹⁸

2. Pembunuhan Tidak Disengaja

Jarimah ini adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan. Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja adalah:

Pertama, perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu semata-mata karena kesalahan.

Kedua, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadikan kematian. Pembunuhan yang terakhir si korban sebagai bagian dari sasaran pelaku.

Ketiga, adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali tidak ada kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Umpamanya saja perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat

¹⁸Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, Jilid III, hlm 120.

atau orang (pelaku) tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa orang lain.

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah kafarat, memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, dan menyerahkan sejumlah harta atau uang. Kalau hal tersebut dihapus keluarga korban, hukuman penggantinya adalah hukuman *ta'zir* dan bagi pelaku pembunuhan yang mempunyai kaitan kewarisan dengan orang yang dibunuh mendapat hukuman tambahan, yaitu terputusnya hak waris yang bersangkutan. Adapun sumber larangan jarimah ini adalah ayat Al-Qur'an yang sekaligus menyatakan sanksi hukumnya, seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 92:



Artinya: "Dan tidaklah layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena kesalahan (tidak sengaja), barang siapa membunuh karena kesalahan, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta menyerahkan diyat kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh menyedekahkannya..." (An-Nisa ayat 92)

Surat An-Annisa tersebut menyoroti masalah motif pembunuhan, korban dan sanksi-sanksinya dan mengandung hukum pembunuhan lantaran kesalahan. Sementara siapa pembunuhnya tidak jelas secara eksplisit. Mengingat membunuh itu dosa besar, maka terjadinya pembunuhan karena kesalahanpun (*human error*) tetap ada sanksinya apalagi pembunuhan itu direncanakan atau disengaja.¹⁹

3. Pembunuhan Semisengaja

Pembunuhan semisengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian

¹⁹Asep Arifin, (2013), *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, Bandung; Fakultas Syari'ah dan Hukum, hlm 44.

seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.

Menurut Imam Syafi'i, seperti yang dikutip Sayid Sabiq, pembunuhan semisengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya (*maa kaana amdan fil fi khath fil qathil*).²⁰

Dalam perbuatan tersebut di atas, ada dua unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan di sisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Alasan lain yang menyebabkan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja, walaupun ada unsur kesengajaan di dalamnya dan bukti kematian korban, yaitu alat yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut adalah alat yang menurut kelaziman, bukan alat yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, menurut akal tidak mungkin hanya dengan pemukulan alat tersebut korban meninggal dunia.

Seperti disinggung di muka, jenis pembunuhan ini tidak diakui keberadaannya oleh ulama Malikiyyah, mereka hanya mengakui bentuk pembunuhan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an saja, yaitu pembunuhan sengaja (*qathul amdi*) dan pembunuhan tidak disengaja (*qathul ghairil amdi*), seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa 92 dan 93. Akan tetapi Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mengakuinya berdasarkan sabda Nabi dalam salah satu khutbah ketika penaklukan kota Mekkah. Namun, menurut Sayid Sabiq para ahli hadits menyebutkan sebagai hadits yang kacau (*mudhatarib*) dan sanadnya tidak shahih. Hadits termaksud adalah sebagai berikut:²¹

أَلَا إِنَّ قَتْلَ الْخَطَاءِ شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ دِيْنُهُ مُغْلَظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبْلِ فِيْهَا
أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهِ أَوْلَادُهَا

²⁰Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Jilid III, hlm 225.

²¹Rahmat hakim, *Op.Cit*, Jilid III, hlm 178.

Artinya: "*Ketahuilah, sesungguhnya pembunuhan semisengaja itu adalah pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu. Diyatnya diberatkan, yaitu seratus ekor unta, empat puluh ekor di antaranya adalah unta-unta yang sedang hamil.*"

Menanggapi permasalahan pembunuhan semisengaja itu, para ulama, seperti dikatakan Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa sesungguhnya pembunuhan semisengaja tidak terletak pada niat semata. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan semisengaja memiliki kemiripan dengan pembunuhan sengaja, yaitu dilihat dari kesengajaannya memukul. Adapun kemiripan dengan pembunuhan tidak sengaja adalah menggunakan suatu alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, yaitu alat yang tidak lazim digunakan dalam kasus pembunuhan.²²

Adakalanya jarimah pembunuhan ini dilakukan oleh beberapa orang yang bersepakat dan mempunyai andil masing-masing dalam melakukan jarimah pembunuhan. Bentuk ini disebut penyertaan (*deelneming*). Menurut pasal 55 KUHP terdapat 4 yang dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam tindakan penyertaan yaitu: (1) Orang yang melakukan (*dader*), (2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), (3) Orang yang turut melakukan (*mededader*), dan (4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*).

Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang yang masing-masing berandil dalam melaksanakannya. Apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerja sama di antara mereka tidak keluar dari empat kondisi berikut.

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut).
2. Pelaku mengadakan permufakatan (persepakatan/*samenspanning*) dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Pelaku menghasut (menggerakkan/*uitlokken*) orang lain untuk melakukan tindak pidana.

²²Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Jilid III, hlm 257.

4. Pelaku memberi bantuan (*medeplichtige*) atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut-melakukan.

Adapun pembunuhan yang disertai dengan penyertaan termasuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja *qatlul 'amd* yang dapat dikenai sanksi *qishash*. Karena keterlibatan banyak orang dan bersepakat maka penyertaan pembunuhan masuk dalam pembunuhan sengaja. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat An-nisa ayat 16, sebagai berikut :



Artinya : “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (An Nisa’ ayat 16).

Dijelaskan bahwa dilarang melakukan perbuatan kejahatan dan keji meskipun statusnya hanyalah suatu bujukan atau ajakan, karena statusnya juga sama seperti pelaku utama. Hal ini dipertegas lagi dengan dilarang melakukan kejahatan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan bersekutu dalam pembunuhan di sini tergantung keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Jika seseorang terlibat dalam pemukulan terhadap pihak terbunuh, maka ia tergolong sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan secara pasti. Adapun, jika seseorang terlibat dalam pemukulan, maka hal ini perlu dicermati lagi. Jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan terjadinya pembunuhan, seperti mencegah pihak yang kehendak dibunuh lalu orang tersebut dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan pihak terbunuh kepada pelaku pembunuhan, ataupun yang lainnya, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai pihak yang turut membantu pembunuhan. Orang semacam ini tidak dibunuh, akan tetapi dipenjara saja.

Sebuah riwayat yang menerangkan mengenai dalil hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan yang dilakukan oleh banyak orang. Riwayat tersebut adalah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ غِيْلَةً، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا (رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب)

Dari Umar bin Khathab pidato yang semoga Allah berkenan terhadapnya. Membunuh satu orang—lima-tujuh-satu orang membunuhnya dengan darah dingin, dan berkata:.. Andaikan penduduk Shan'a bersepakat membunuhnya maka saya akan membunuhnya mereka semuanya (diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta untuk Saeed bin Musayyib)²³

Pertanggungjawaban pidana Atau dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *Al-Mas'uliyah Al-Jinayah*. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatan itu.²⁴ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan orang lain secara paksa (dipaksakan). Berkenaan dengan ini ada beberapa kaidah yang mengatakan diantaranya:

كُلُّ مَنْ جَنَى جُنَايَةً فَهُوَ الْمُطَالِبُ بِهَا

Artinya: “Setiap orang yang melakukan jarimah maka dialah yang harus mempertanggungjawabkan”

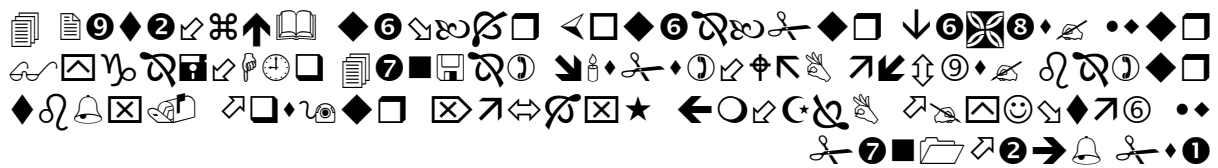
Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang harus mempertanggungjawabkan suatu pertanggungjawaban jarimah adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yang didasari dengan maksud jahat. Sedangkan orang yang tidak terlibat baik langsung maupun tidak

²³Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rasyd Al Qurtubi, *Bidayatu Al Mujtahid, Juz. II*, (Bierut: Dar Al Fikr, t.th.), hlm 299.

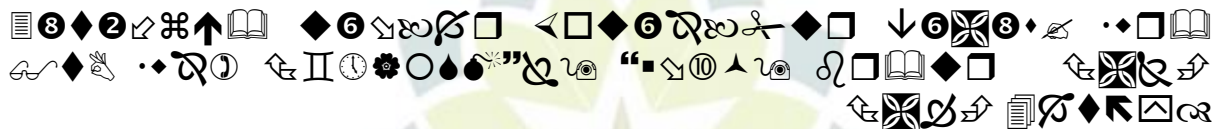
²⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Op.Cit* 154; Lihat Juga Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm 74; lihat juga Topo Santoso, (2001), *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung : Asy Syaamil, hlm 166.

langsung dengan perbuatan tersebut tidak boleh dituntut.²⁵ Hal ini didasari atas firman Allah

SWT :



Artinya :*dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain²⁶. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.....(Al-Fathir ayat 18).*



Artinya :*(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,(Al-Najm ayat 38-39).*²⁷

Atas dasar ini, seseorang hanya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa adakalanya suatu perbuatan jarimah terjadi karena adanya kerjasama diantara beberapa pelaku. Diantara mereka ada yang berbuat langsung dan ada pula yang tidak, tetapi menjadi sebab (perantara) terjadinya. Orang yang berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* (*syarik mubasyir*) dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*. Orang yang tidak berbuat langsung dalam melaksanakan *jarimah* (*syarik mutasabbib*) perbuatannya disebut *al-istirak ghairul mubasyir* atau *al-istirak bi at- tasabubi*.

Mayoritas fukaha membedakan antara tanggung jawab pelaku-langsung pada kasus kebetulan (*tawafuq*) dan kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamalu*). Pada kasus "*kebetulan*", setiap pelaku-langsung hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya

²⁵Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (2004). Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm 18.

²⁶ Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

²⁷Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Jilid II, hlm 58.

dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Contohnya, ada dua orang memukul seseorang. Salah satu di antara dua orang ini (orang pertama) memotong tangannya, sedangkan yang lain (orang kedua) memotong lehernya. Orang yang pertama bertanggung jawab atas pemotongan, sedangkan yang kedua bertanggung jawab atas pembunuhan. Pidana seperti ini adalah kasus pidana yang sudah direncanakan (*tamalu'*); mereka berdua sama-sama bertanggung jawab atas pembunuhan itu.²⁸

Tawafuq bermakna niat orang-orang yang turut-serta dalam tindak pidana adalah untuk melakukannya, tanpa ada kesepakatan (permufakatan) sebelumnya di antara mereka. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul seketika itu.

Mereka yang turut serta berbuat tidak langsung, adakalanya disertai dengan maksud jahat dan adakalanya tidak. Orang yang berbuat tidak langsung tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana bila ia melakukannya tidak disengaja atau tidak disertai dengan maksud jahat. Sedangkan orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai kaidah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ

“Apabila bersatu antara yang berbuat langsung dengan yang tidak maka hukuman diberikan kepada yang berbuat langsung”²⁹

²⁸*Ibid*, hlm 37.

²⁹Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, *Op.Cit*, hlm 25.

Misalnya, seorang menggali sumur dengan tidak ada maksud untuk mencelakakan orang lain. Kemudian ada orang-orang lain menjatuhkan seseorang lainnya ke dalam sumur itu sehingga menyebabkan mati. Orang yang membuat sumur itu tidak dikenai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada maksud jahat, sedangkan yang menjatuhkan dikenai pertanggungjawaban pidana.

Adapun orang yang berbuat langsung selamanya akan dikenai pertanggungjawaban meskipun tidak disengaja atau tidak disertai dengan maksud jahat, sesuai dengan kaidah :

الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ

“Orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggungjawaban meskipun tidak disengaja”³⁰

Misalnya, seorang supir menabrak seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut mati. Sopir tersebut akan dikenai pertanggungjawaban pidana, meskipun ia melakukannya tanpa disengaja.

Berdasarkan dari pembagian terhadap pelaku *jarimah* menjadi dua berbuat secara langsung dan berbuat secara tidak langsung, maka sanksi bagi pelaku jarimahpun berbeda antara berbuat secara langsung dengan berbuat secara tidak langsung. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku jarimah pembunuhan dengan penyertaan menurut hukum pidana Islam.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *penelitian deskriptif analisis*, yaitu metode yang sifatnya menggambarkan keadaan data apa

³⁰*Ibid*, hlm 26.

adanya tanpa penambahan atau pengurangan data, dalam penelitian hukum dapat diterapkan metode deskriptif dengan pendekatan normatif.³¹ Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yaitu adalah data yang berhubungan dengan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam Undang-Undang dan Kitab Fiqih.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data *primer*, adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu KUHP dan kitab *al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* karya Abdul Qadir Audah.
- b. Adapun sumber data *sekunder*, adalah buku-buku yang berkaitan dengan penyertaan pembunuhan serta buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan:

- 1) reduksi data, mengumpulkan data mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam hukum pidana Islam
- 2) pengolahan data mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56, Hukum pidana Islam, serta persamaan dan perbedaan antara

³¹ Beni Ahmad Saebani, (2008). *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, hlm 119.

KUHP Pasal 55-56 dan Hukum Pidana Islam, dan 3) penulisan laporan secara sistematis.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka analisis terhadap data tersebut dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa literatur berupa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pembahasan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56 dan Hukum Pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56 dan Hukum Pidana Islam, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan yang sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas dalam masalah penelitian.